

KONFLIK PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBERDAYA DALAM ERA OTONOMI DAN TRANSISI MASYARAKAT (Pemahaman Teoritis dan Pemaknaan Empiris)

M. Baiquni* & R. Rijanta[®]

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah yang diluncurkan di tengah krisis multidimensi dan transisi masyarakat madani, membawa sejumlah implikasi dan komplikasi dalam pelaksanaannya di berbagai tingkatan. Reformasi rezim dan perubahan kebijakan secara mendadak dari sentralisasi ke desentralisasi, berlangsung dalam situasi ketidakpastian yang diwarnai krisis ekonomi, konflik sosial dan gejolak politik. Sementara itu ketegangan, perselisihan, konflik, dan bahkan konflik dengan kekerasan masih berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemahaman teoretis dan pemaknaan empiris terhadap fenomena konflik sosial dan spatial kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, dipetakan dan didiskusikan dalam tulisan ini. Tulisan ini dimulai dengan analisis perubahan peradaban yang cepat dan transisi masyarakat, pemetaan teori konflik, kemudian menitik pada persoalan konflik lingkungan dan sumberdaya alam di Indonesia dengan menganalisis data empirik mengenai berbagai kasus konflik antardaerah dan antarsektor serta stakeholders. Diskusi diakhiri dengan agenda riset untuk memahami persoalan dan resolusi konflik.

Kata kunci: teori konflik, manajemen konflik, perubahan dan tansisi masyarakat, otonomi daerah, pengelolaan sumberdaya

^{*}) *Dr. M. Baiquni, M.A.* adalah dosen pada Jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi, Deputi Direktur Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada. (Korespondensi: baiquni@lead.or.id)

[®]) *Dr. R. Rijanta, M.Sc.* adalah dosen pada Jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi, Sekretaris Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional, Universitas Gadjah Mada. (Korespondensi: masrijanta@yahoo.com)

1. Pendahuluan

Periode setelah perang dunia II ditandai dengan konflik dan persaingan dua kutub kekuatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam berbagai kancas seperti persetujuan intelijen, perlombaan senjata, pengembangan senjata nuklir, hingga program perang bintang. Mereka berlomba-lomba mengeksploitasi sumberdaya alam dan manusia untuk menunjukkan keunggulan ideologi dan sistem yang dibangunnya, baik itu yang berwajah kapitalisme maupun komunisme. Perang dingin tersebut lebih bernuansa persaingan dan konflik dalam memperebutkan pengaruh geografisnya dalam memperluas ideologi dan sistem ke berbagai negara, yang disebut periode perang dingin atau *Cold War* (Porto, 2002; Billon, 2001).

Perang dingin tersebut terkait juga perang dagang dan perebutan wilayah pengaruh geografis di negara-negara yang kaya sumberdaya alam, seperti Kawasan Timur Tengah (minyak), Afrika (tambang mineral), Amerika Latin (lahan perkebunan dan hutan), termasuk Indonesia (minyak, gas, mineral, hutan). Masing-masing pihak menanamkan pengaruhnya dengan berbagai label bantuan yang sebenarnya adalah hutang yang diwujudkan dalam bentuk bantuan teknis tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, teknologi, keuangan, maupun peralatan berat dan mesin perang.

Jatuhnya Uni Soviet dan sekutu-sekutunya termasuk fenomena runtuhnya Tembok Berlin menandai berakhirnya perang dingin. Dengan demikian ketegangan dua kutub tidak ada lagi. Struktur kekuatan yang ada menjadi unipolar di bawah pimpinan Amerika Serikat yang sampai saat ini tiada

tandingannya. Dinamika dan pola konflik bergeser ke internal negara yang berwujud konflik lokal kedaerahan, konflik etnis, konflik kelompok militan agama, konflik antarkelompok yang ingin menjadi penguasa, konflik perebutan sumberdaya antar sektor maupun antar *stakeholders*. Berbagai teori dan metodologi mengenai perang dan konflik termasuk perdamaian dan resolusi konflik juga mengalami pegeseran, seperti yang diungkapkan oleh Porto (2002) yang menyatakan bahwa *the tools of srategic and war studies seemingly irrelevant to explain ethno-nationalism, religious militancy, environmental degradation, resource scarcity, preventive diplomacy, peacekeeping or humanitarian intervention*.

Konflik setelah perang dingin, menurut Billon (2001) dicirikan dengan meningkatnya konflik bersenjata pada berbagai wilayah kaya sumberdaya alam. Konflik sering muncul berkaitan dengan perebutan akses dan kontrol atas sumberdaya alam, seperti mineral tambang, sungai, danau, lembah subur (Jones, 1998). Akhir-akhir ini banyak muncul konflik kontemporer atau perang baru seperti *resource war, globalized war economy, organized crime, state terrorism* maupun *radical terrorism* yang diwarnai oleh nuansa kepentingan global. Porto (2002) terkait dengan transformasi struktural perang yang terjadi karena perubahan radikal berkaitan dengan tujuan konflik, mengemukakan bahwa *the profile of wars has changed because 'new wars' are about identity politics in contrast to the geo-political or ideological goals of earlier wars. Ranging from ethnic politics to nationalist movement claiming independence or sucession, the*

vast majority of groups engaged in contemporary armed conflicts define themselves or the basis of their identity, whether of a national, ethnic, religious or cultural character. (p. 5)

Konflik kontemporer terkait dengan isu yang lebih luas dan kompleks seperti hak asasi manusia, gender, keadilan antargenerasi, dan penghargaan terhadap alam yang tidak hanya berdimensi lokal, tetapi bahkan berdimensi global. Konflik ini juga memiliki dimensi waktu, pembangunan yang berorientasi kepentingan sesaat dengan resiko lingkungan yang hebat, akan berhadapan dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi kepentingan jangka panjang generasi berikutnya. Pada dasarnya konflik kontemporer tersebut didorong oleh agenda ekonomi, terutama konflik di negara sedang berkembang (Porto, 2002). Sementara itu, konflik dengan kekerasan, cenderung terus meningkat dan semakin kompleks dari waktu ke waktu (Cornwall, 2002).

Realitas pertumbuhan ekonomi ternyata justru memperluas kesenjangan dan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh banyak orang, terutama di negara miskin dan sedang berkembang. Keangkuhan negara maju dalam mengeksploitasi sumberdaya alam dan memonopoli perdagangan global, telah menyebabkan sejumlah krisis ekonomi dan krisis ekologi, bahkan menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan, seperti kemiskinan, kelaparan dan konflik peperangan. Sementara pemanasan global dan kerusakan ozon (*global warming*) merupakan salah satu contoh pola konflik yang bersifat global. Kerusakan lingkungan global merupakan kontribusi semua pihak terutama negara maju

dan orang kaya yang mengkonsumsi energi dan membuang limbah lebih besar, dibandingkan negara sedang berkembang dan orang miskin. Dampak lingkungan global justru paling diderita oleh orang miskin di negara sedang berkembang padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Sebaliknya orang kaya di negara maju dapat mengatasi dampaknya untuk menyelamatkan diri sendiri dengan berbagai cara dan teknologi yang semuanya bisa mereka bayar (Baiquni dan Susilawardani, 2002).

Dalam konteks Indonesia, sejak reformasi terjadi perubahan drastis dari pemerintahan yang sentralistik ke otonomi menimbulkan perubahan pola dan dinamika konflik internal. Berbagai konflik horizontal maupun vertikal muncul dan bahkan konflik dengan kekerasan (*violence conflicts*) merebak di berbagai daerah. Konflik dengan kekerasan memiliki pola yang beragam, antara lain konflik antara pusat dan daerah (*center and periphery*) seperti terjadi di Aceh dan Papua, ada sekelompok gerakan bersenjata yang ingin merdeka, demikian pula dalam bentuk konflik pada tingkat wacana oleh sejumlah kelompok di daerah Riau dan Kalimantan Timur yang kaya sumberdaya alam ingin mandiri. Konflik etnis terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan. Konflik dengan membawa identitas agama juga terjadi di Ambon, Maluku Utara dan Poso. Konflik antardesa terjadi di sejumlah daerah di Jawa yang pada awalnya hanya perkelahian antar pemuda merembet konflik antar masyarakat, baik di desa maupun di kota.

Konflik dalam bentuk ketegangan dan perselisihan dengan kadar kekerasan yang rendah semakin banyak terjadi di era

otonomi. Selain itu eksklusivitas kedaerahan juga muncul di beberapa daerah dalam bentuk aturan-aturan lokal yang diarahkan untuk membatasi mobilitas sosial maupun mobilitas spasial kelompok tertentu, khususnya para migran pencari kerja (Rijanta, 2002). Di beberapa daerah kabupaten/kota ditemukan produk-produk hukum, khususnya peraturan daerah yang diciptakan untuk memberi peluang bagi putra daerah untuk memperoleh akses yang lebih besar dalam berbagai kesempatan ekonomi yang ada. Beberapa di antaranya justru kontra produktif karena isinya mewajibkan investor untuk mempekerjakan sejumlah persentase tertentu warga putra daerah yang dari segi ketrampilan justru kurang memadai. Arus migrasi antardaerah di Indonesia sebagai salah satu mekanisme redistribusi sumberdaya alam secara moderat telah mengalami penurunan, terutama ke daerah-daerah rawan konflik di kawasan timur Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut, pemekaran wilayah juga telah dipakai sebagai salah satu cara menghindari konflik atas ketidakpuasan terhadap pengelolaan sumberdaya pembangunan (Rijanta, 2006) meskipun seringkali juga menimbulkan konflik baru.

Tulisan ini bertujuan memahami konflik dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan pada aras teoretik dan memberikan pemaknaan empirik atas konflik perebutan sumberdaya maupun konflik lingkungan sebagai salah satu pemicu konflik antardaerah dan antarkelompok masyarakat. Pembahasan diawali dengan perspektif teoretik atas konflik perebutan sumberdaya dan perselisihan lingkungan yang kemudian diikuti dengan mengkaji pengalaman empiris konflik di sejumlah daerah dan antar

kelompok masyarakat di Indonesia. Lebih lanjut diusulkan sejumlah agenda riset untuk memahami akar persoalan konflik dan bagaimana konflik dari yang sering dianggap negatif dapat diubah menjadi peluang positif (*conflict resolutions*).

2. Perspektif Teori Konflik Lingkungan dan Sumberdaya Alam

Pemahaman teoretik dan pemaknaan empirik mengenai perubahan dan transisi masyarakat kaitannya dengan konflik atas sumberdaya sebenarnya sangat kompleks. Fink (1968) mengemukakan betapa panjang dan kompleks sejarah konflik sosial. Pertanyaan ilmiah mengenai hal itu sama tuanya dengan ilmu sosial itu sendiri. Artinya studi-studi mengenai konflik telah lama dilakukan. *In many disciplines and from many viewpoints, great bodies of data have been collected, and countless generalizations, hypotheses and theories have been constructed to account for sosial conflict phenoema* (p. 412).

Studi mengenai fenomena konflik lingkungan lebih mudah daripada studi konflik sosial, yaitu ketika isu lingkungan mengemuka dan menjadi fokus perhatian. Perselisihan mengenai lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial bahkan perang antarbangsa tidak hanya berujud perebutan akses sumberdaya alam, tetapi pada peradaban modern dapat berupa pencemaran air atau polusi atmosfer. Konflik lingkungan yang terjadi memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan antarsektor dan *stakeholders* pembangunan. Glasbergen (1995) menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan lingkungan seringkali

terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukan persoalan fisik tetapi juga mencakup dimensi kepentingan subjek pelakunya.

Pada uraian berikut ini disajikan peta teori konflik, khususnya yang berkaitan dengan konflik sumberdaya dan lingkungan. Sejumlah literature tentang teori konflik yang relevan dengan kondisi konflik sumberdaya dan lingkungan di Indonesia saat ini. Secara berturut-turut dikemukakan empat teori atau perspektif memahami konflik sumberdaya dan lingkungan, yaitu teori ketamakan (*the greedy theory*), *NIMBY syndrome*, teori mengail di air keruh (*profit taking*), teori kemerosotan dan kelangkaan (*deprivation and scarcity*). Teori-teori ini digunakan sebagai latar pengetahuan dalam memahami kondisi empirik konflik sumberdaya dan lingkungan di Indonesia.

a. Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*)

Kerakusan dan ketamakan merupakan salah satu sifat buruk manusia yang secara sengaja atau tidak dapat muncul dalam perilaku hubungan manusia dengan alam, maupun manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marjinalisasi kepentingan masyarakat lain (Billon, 2001; Porto, 2002). Eksploitasi sumberdaya tersebut mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan daya hidup masyarakat yang lain. Contoh di Indonesia secara singkat mengenai kasus penguasaan sumberdaya hutan melalui HPH yang

diberikan pada para pengusaha pusat dan investor asing. Meskipun kebijakan hutan telah dapat menggerakkan ekonomi lokal dan bermanfaat meningkatkan devisa, tetapi pada saat yang bersamaan juga menimbulkan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan sekaligus marjinalisasi kehidupan suku-suku masyarakat pedalaman yang hidup secara turun temurun mengelola hasil hutan.

Kepentingan ekonomi nasional memang memperoleh manfaat dari devisa hasil hutan, tetapi daya hidup masyarakat lokal mengalami penurunan. Kebijakan lingkungan yang dikembangkan kemudian adalah pemberian kompensasi misalnya dengan program bina desa hutan dan reboisasi. Dalam jangka pendek pemberian kompensasi ini dapat meredam konflik atau menyembuhkan luka permukaan, tetapi beban psikologis dan kemunduran masyarakat hutan memiliki konsekuensi buruk dan berjangka panjang. Demikian pula dana reboisasi banyak yang berhamburan salah sasaran atau sengaja disalahgunakan atau dikorupsi, sehingga upaya penghutanan kembali banyak yang gagal.

Keuntungannya jelas telah dinikmati oleh para konglomerat dan pengusaha yang bekerjasama dalam mata rantai tersebut, tetapi kerugian jelas-jelas sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Bahkan para pekerja pendatang yang semula turut menikmati tetesan ekonomi, akhirnya juga harus menanggung kerugian akibat munculnya konflik di tingkat bawah. Pelajaran yang dapat dipetik adalah eksploitasi sumberdaya alam yang melebihi batas dan tidak mengindahkan tradisi masyarakat setempat akan mengalami

kehancuran. Pengusaha dan pemerintah pusat merasakan keuntungan dan menikmati kemakmuran, tetapi kerugian ekologis turun-temurun dirasakan oleh masyarakat asli dan kepedihan psikologis diderita oleh para penduduk pendatang.

Kerakusan eksploitasi sumberdaya alam berlangsung secara bertahap dan hierarkis. Dari wilayah pinggiran di luar Jawa disedot ke Jawa terutama Jakarta sehingga ibarat *vacum cleaner* atas nama pembangunan nasional maka mengalirlah surplus nilai sumberdaya itu masuk ke pusat (Baiquni, 2003). Meskipun secara normatif akan terjadi *revenue sharing* sebagai konsekuensi dari keberadaan Indonesia sebagai kesatuan, tetapi realitanya banyak dirasakan ketidakpuasan dari berbagai daerah yang kaya sumberdaya, seperti yang muncul dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Dari perspektif hubungan *center-periphery* sebagian dari akumulasi sumberdaya keuangan di Jakarta sebenarnya hanya sebagai pengumpul untuk disedot lagi oleh pusat-pusat kekuatan global. Dalam hubungan seperti ini Jakarta adalah pinggiran dari pusat-pusat kekuatan dunia yang bemarkas di New York, London, Tokyo, Paris, Brussel dan Amsterdam. Mekanisme eksploitasi sumberdaya dari periphery dalam kaitan hubungan *center-periphery* seperti ini di antaranya dilakukan melalui lembaga-lembaga donor internasional maupun usaha-usaha multinasional dalam bentuk usaha lisensing berbagai makanan cepat saji dan minuman ringan serta usaha ekspor dan import.

b. NIMBY (*Not In My Back Yard*) Syndrome

Konflik lingkungan yang bersumber pada pemindahan masalah ke tempat lain. Berkaitan dengan pola ini muncul idiom NIMBY (*Not In My Back Yard*) yang merupakan gejala munculnya sikap individualistis bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan. Fenomena ini terkait dengan kebangkitan kesadaran tentang lingkungan pada dasawarsa 1960-an di negara-negara maju terutama Eropa dan Amerika. Mereka sadar bahwa polusi dan pencemaran akan menurunkan kualitas hidup. Kemudian mereka mendesak untuk mengalihkan industri dan produk teknologi yang tidak ramah lingkungan ke negara-negara lain.

Fenomena NIMBY ini misalnya ditunjukkan dengan relokasi industri yang sudah tidak efisien dan kotor dari negara maju ke negara sedang berkembang. Bila dicermati secara kritis, kebijakan relokasi industri dan alih teknologi yang dikampanyekan negara maju ke negara sedang berkembang, tidak lepas dari sindrom NIMBY. Sepintas kebijakan dan program itu sangat mulia membantu masyarakat negara sedang berkembang dari keterbelakangan ekonomi, tetapi di belakangnya ada pengalihan industri yang polutif dan penjualan teknologi yang sudah usang dengan label transfer teknologi yang didukung dengan hutang luar negeri yang dikemas sebagai bantuan.

Sementara itu pemerintah di negara-negara sedang berkembang merasa dengan bangga menerima program-program internasional yang dikemas secara halus dengan bantuan tenaga ahli, bantuan teknis,

bantuan pinjaman lunak dan berbagai paket bantuan. Apa yang terjadi di lapangan bisa berbeda jauh dengan harapan. Berbagai produk teknologi yang diterima seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan dan bahkan beberapa peralatan tidak dapat digunakan karena tidak ada infrastruktur dan material yang mendukungnya.

Sebagai contoh banyak peralatan laboratorium di perguruan tinggi dan badan litbang departemen yang didatangkan, tetapi nganggur karena tidak sesuai kebutuhan. Jumlah kasus-kasus alih teknologi yang terbengkalai jumlahnya cukup besar, belum lagi teknologi yang tidak sesuai dengan lingkungan. Barang-barang teknologi tersebut sering di negara asalnya sudah tidak dipakai dan bahkan ada sejumlah industri yang telah dilarang berproduksi di negaranya, dialihkan ke Indonesia. Pada gilirannya sering juga terjadi berbagai bantuan teknologi dari negara maju tidak berlanjut karena tidak adanya suku cadang, peralatan maupun personil yang mendukung keberlanjutannya. Bahkan di negara asal teknologi tersebut perusahaan yang memproduksi sudah ditutup dan beralih ke usaha lain yang tidak polutif.

Banyak kasus-kasus limbah nuklir dari negara maju yang dibuang ke wilayah negara-negara miskin, melibatkan birokrasi pemerintah yang korup dan jaringan mafia. Kebetulan sampah nuklir tidak dibuang di Indonesia, tetapi banyak kasus telah ditimbun di bekas tambang di sejumlah negara Afrika dan dibenamkan di Lautan Pasifik.

Sindrom NIMBY, pada dasarnya juga terjadi pada lingkungan kecil di sekitar kita. Ketegangan dan konflik kecil juga bisa

terjadi dalam meletakkan tempat sampah sementara di sebuah lingkungan permukiman. Pada dasarnya tidak ada satu rumah tangga pun yang rela jika depan rumahnya menjadi tempat penampungan sampah sementara dari para tetangga. Seringkali persoalan sampah menjadi persoalan rumit yang menguras energi warga, terutama di lingkungan yang sempit berkepadatan tinggi pada saat-saat musim hujan. Solusinya seringkali menimbulkan masalah baru, misalnya menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Respon ketidakpuasan pun sangat mungkin muncul di bagian lain dari sungai akibat dari perlakuan warga terhadap sungai sebagai tempat pembuangan sampah atau respon dalam bentuk yang paling lazim adalah sama-sama ikut membuang sampah ke sungai. Akibatnya, semua warga dapat memelihara lingkungan rumahnya tetap bersih, tetapi mengorbankan sungai sebagai bagian dari sistem hidrologi menjadi tercemar.

c. Memancing di Air Keruh (*Profit Taking*)

Berbagai konflik yang muncul dapat menjadi ajang memperoleh keuntungan bagi segelintir atau sekelompok orang di atas penderitaan orang lain. Para pengusaha baik penghasil maupun penjual dan broker senjata adalah para pengambil keuntungan baik di saat damai maupun perang. Para penghasil senjata canggih justru negara kaya dan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Jerman; Demikian pula para pengusaha pemasok senjata baik yang legal maupun illegal adalah orang kaya dan kuat. Maka sesungguhnya konflik dan perang tidak terlepas dari penyalahgunaan peran ilmu

pengetahuan dan teknologi yang mestinya untuk kesejahteraan umat manusia.

Invasi Amerika ke Irak diduga kuat merupakan upaya menguasai sumberdaya minyak, sedangkan penegakan demokrasi hanya sebagai kedok belaka. Buktinya banyak rezim yang tidak menerapkan demokrasi di negara-negara Timur Tengah tidak diganggu, asal tetap menuruti kepentingan negara adikuasa tersebut. Penguasaan sumber minyak untuk kepentingan pasokan energi negara adidaya merupakan bentuk kerakusan dan penciptaan konflik bersenjata dapat dilihat sebagai perdagangan produk industri mesin perang. Jika dirunut lebih mendalam pihak yang membiayai perang Teluk 1992 dan 2003 adalah negara-negara di kawasan Teluk itu sendiri seperti Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, yang juga kaya sumberdaya minyak. Maka menurut teori ini, konflik dan perang selalu akan diciptakan sebagai upaya membuka peluang bisnis paling tidak menjual senjata dan mesin perang.

Perbendaharaan kata dalam Bahasa Indonesia mengenal berbagai konsep terkait dengan adu domba, belah bambu, dan memancing di air keruh. Adanya konflik justru memberi peluang bagi pihak tertentu untuk mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Amat sulit untuk menganalisis peran orang, kelompok atau negara yang sepak terjangnya suka mengambil keuntungan di tengah-tengah kesulitan orang lain. Kadang mereka menyamar sebagai juru damai, juru runding, atau bahkan seolah-olah sebagai pembela bagi yang lemah.

d. Teori Kemosotot dan Kelangkaan (*Deprivation and Scarcity*)

Ohlsson, (2000) dalam tulisannya *Water Conflicts and Sosial Resource Scarcity* menampilkan index mengenai *Hydrological Water Stress Index* (HWSI) dan *Sosial Water Stress Index* (SWSI). Ia memprediksi bahwa antara 1995 hingga 2025 terus terjadi peningkatan tekanan atas sumberdaya alam menuju kelangkaan yang semakin parah di berbagai negara, khususnya negara miskin. Data ini akan lebih menarik bila dikaitkan dengan peta konflik, dilihat dari perspektif kelangkaan sumberdaya sebagai pemicu konflik dalam melihat akar permasalahan di sejumlah negara miskin atau daerah terbelakang.

Menurut para penganut teori *Scarece Resource Wars* bahwa seseorang, sekelompok orang atau bangsa akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mempertahankan dan mengamankan akses dan kontrol atas sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau survival; Semakin langka sumberdaya, semakin dasyat perebutannya (Billon, 2001; Jones, 1998; Porto, 2002). Kelangkaan berarti kesenjangan yang tak dapat lagi ditoleransi atau diterima antara apa yang diinginkan dan apa yang dapat diraih. Kelangkaan ini dalam kurun waktu tertentu menyebabkan orang atau kelompok orang mengalami kesulitan dan frustrasi, sehingga dapat memicu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau melanggar hak orang. Ketika orang harus antri untuk mendapatkan sesuatu, maka berarti masih ada aturan yang dapat mengatur hak orang yang datang lebih dahulu untuk memperoleh kesempatan yang pertama, *first come, first serve*. Konflik sering

muncul ketika terjadi penyerobotan dan pelanggaran yang tidak lagi dapat dikendalikan. Maka dalam situasi demikian perebutan dan konflik akan terjadi dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas.

Masalah semacam ini juga sering terjadi dalam perspektif *deprivation* atau kemerosotan yaitu suatu kondisi yang secara bertahap mengalami penurunan semakin memburuk. Dalam kaitannya dengan konflik sumberdaya dapat berarti adanya kemerosotan relatif dan absolute (*resource depletion*). Kemerosotan dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok menganggap atau merasa yang lain lebih maju sedangkan seseorang tadi berada dalam posisi stagnan atau mengalami kemandekan. Kesenjangan yang tidak lagi dapat ditolerir akan mengakibatkan berbagai symptom rendah diri atau justru tak tahu diri. Banyak fenomena kesenjangan yang terjadi diakibatkan oleh warga mayoritas yang rendah diri dan warga minoritas yang tak tahu diri; seperti orang yang kaya raya yang secara demonstratif selalu pamer kekayaan di tengah para tetangganya yang miskin.

Sumberdaya lahan dan air di sejumlah tempat menjadi ajang perebutan yang sengit apalagi pada saat paceklik. Di kawasan Tanduk Afrika (*Horn of Africa*) misalnya Sudan, Ethiopia dan Somalia; konflik kerap terjadi antarsuku yang menetap dengan suku *nomaden*. Konflik ini tidak saja menyangkut kelompok suku, tetapi telah melampaui batas-batas antarnegara. Perang sipil yang terjadi di Sudan diwarnai oleh kompetisi kontrol atas lembah subur dan air Sungai Nil; menyebabkan pemerintah Sudan dan Mesir harus memfasilitasi upaya perdamaian di antara *stakeholders* yang bertikai (Porto, 2002).

3. Studi Empiris Konflik Antar dan Intern Daerah

Sebagai bahan refleksi, dikemukakan suatu fenomena konflik antaretnis Madura dan Dayak, yang tidak bisa dilepaskan dari perubahan konstelasi kekuatan dan permasalahan lingkungan. Suku Madura yang bermigrasi ke Kalimantan sebagai pekerja di HPH dan perkebunan maupun yang datang sebagai transmigran, memiliki persepsi dan nilai yang berbeda dengan suku asli Dayak dalam memperlakukan dan memanfaatkan hutan. Suku Dayak memiliki kebudayaan hutan yang kuat, adat istiadat yang begitu dekat dengan alam yang menganggap hutan sebagai rumah dan sumber penghidupan yang lestari. Suku Madura tidak banyak memiliki tradisi hutan, mengingat di daerah asalnya di Pulau Madura kondisinya relatif kering dan tandus. Mereka didatangkan untuk bekerja di perusahaan HPH yang tugasnya memotong pohon hutan dan sebagai tenaga kasar di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pada era Orde Baru, bisnis kehutanan tidak lepas dari peran aparat keamanan yang turut mengontrol konflik di lapangan. Ketika reformasi awal berlangsung, peranan aparat keamanan agak mengendor, sehingga terjadi kekosongan kekuatan. Akibatnya, pekerja etnik Madura langsung berhadapan dengan penduduk Dayak. Letupan konflik tidak terhindarkan, karena penduduk asli merasa lingkungan dan penghidupannya terganggu oleh kegiatan HPH.

Persoalan konflik etnis semacam ini sesungguhnya telah terjadi beberapa kali di Kalimantan. Sambas termasuk salah satu

wilayah yang telah mengalami sejarah konflik etnis yang panjang, berkali-kali dan masih dalam skala kecil. Konflik etnis skala besar dalam perhitungan jumlah korban, tingkat kekerasan dan kerugian harta benda, terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang. Masa transisi ini menimbulkan perubahan pola kekuatan di sejumlah daerah, khususnya di wilayah pinggiran. Kemarahan penduduk yang sudah lama marjinal dan tertindas, seperti meluap tanpa dapat dibendung menimbulkan akumulasi kekerasan yang mengerikan.

Penduduk lokal Dayak yang telah lama marjinal merasa bahwa yang mereka lihat di lapangan merusak hutan adalah suku pendatang Madura. Padahal para pekerja asal etnis Madura ini sesungguhnya adalah buruh perusahaan besar menjadi mata rantai paling depan dari bisnis main kayu yang juga tereksploitir tenaganya. Sayangnya yang terjadi di lapangan adalah kekerasan antarpenduduk yang sesungguhnya sama-sama menjadi korban dari sistem eksploitasi hutan yang tidak adil dan berkelanjutan (Baiquni dan Susilawardani, 2002).

Berbagai konflik antar *stakeholders* dan sektor dalam memperebutkan sumberdaya maupun mempersoalkan lingkungan muncul di berbagai daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi lebih

beragam lagi konflik yang terjadi antara pusat dan daerah, antar daerah dan intern daerah. Berbagai konflik yang terdokumentasikan dalam pemberitaan berbagai surat kabar di Indonesia disajikan dalam Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa sejak tahun 1998 sampai saat ini kejadian konflik berlatarbelakang sumberdaya alam di Indonesia ada kecenderungan semakin meningkat sejalan dengan otonomi daerah. Banyak di antara contoh-contoh konflik pemanfaatan sumberdaya tersebut semakin kuat artikulasinya justru setelah dimulainya otonomi daerah.

Tema-tema konflik yang terjadi setelah otonomi pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, konflik antara pemerintah pusat dan daerah propinsi atau kabupaten/kota dan konflik antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Tipe-tipe konflik yang terjadipun juga beragam mulai dari konflik yang tingkatnya kognitif (terdapat perbedaan pada ilmuwan tentang sesuatu tindakan pemanfaatan sumberdaya yang terbaik), nilai (terdapat dua kegiatan eksploitasi sumberdaya atau lebih yang tidak saling kompatibel), interest (terdapat keragaman

Tabel 1.
Contoh Konflik Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Alam

No.	Lokasi	Stakeholders Berkonflik	Inti konflik	Resolusi Konflik
1.	Salatiga dan Kabupaten Semarang	Petani PDAM Kab. Semarang Batalion 411 Pabrik Tekstil Damatek	Petani hanya memperoleh sebagian kecil dari air Umbul Senjoyo, sementara pipa-pipa besar melintang melalui lahan mereka	Tidak diketahui
2.	Klaten	Masyarakat dan petani Desa Arunsari PDAM Klaten	Masyarakat dan petani di sekitar umbul merasa keberatan dengan penggunaan air oleh PDAM sejak tahun 1970an tanpa kompensasi	PDAM beri kompensasi dana pembangunan desa Rp800.000,- yang kemudian naik Rp 2.000.000,- per tahun

3.	Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta	Masyarakat desa umbul Pemerintah desa setempat Pemkot Surakarta	Masyarakat sekitar Umbul Sungsang menolak pemanfaatan air untuk PDAM Surakarta, meskipun pemerintah desa sudah mengalokasikan banyak uang untuk membangun umbul tersebut	Negosiasi sudah berjalan 2 tahun sampai berita diturunkan
4.	Propinsi Riau	Pemerintah pusat Pemerintah propinsi Masyarakat	Pemerintah pusat mengizinkan penambangan pasir laut untuk ekspor ditentang pemerintah propinsi dan masyarakat karena merusak lingkungan	Tidak diketahui
5.	Propinsi Riau	Pemerintah pusat Pemerintah daerah dan masyarakat	Pemerintah daerah dan masyarakat menuntut agar pengelolaan CPP Block diserahkan kepada masyarakat, sedangkan pemerintah pusat masih bermaksud mengelolanya	Dibentuk Badan Operasi Bersama (BOB) untuk mengelola CPP Block
6.	Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta	Pemerintah Kabupaten Tangerang Pemerintah DKI Jakarta	Pemerintah Kabupaten Tangerang mengancam memutus saluran air untuk PDAM jika tuntutan kenaikan harga tidak dipenuhi	Tidak diketahui
7.	Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta	Pemerintah Kabupaten Boyolali Pemerintah Kota Surakarta	Pemerintah Kota Surakarta mengancam menerapkan pajak kepala terhadap pekerja asal Kabupaten Boyolali	Tidak diketahui
8.	Kabupaten Kendal dan Kota Semarang	Pemerintah Kabupaten Kendal Pemerintah Kota Semarang	Pemerintah Kabupaten Kendal mengancam memutus saluran air untuk PDAM jika tuntutan kenaikan harga air dari Umbul Boja tidak dipenuhi	Tidak diketahui
9.	Kepulauan Masalembu	Nelayan asal Kabupaten Pekalongan Masyarakat Masalembu	Masyarakat sekitar Masalembu melarang nelayan dari Kabupaten Pekalongan untuk menangkap ikan di sekitar perairan Masalembu	Tidak diketahui
10.	Jawa Tengah	Pemerintah beberapa kabupaten	Beberapa kabupaten di Propinsi Jawa Tengah menyiapkan peraturan untuk dapat memungut ongkos penggunaan jalan bagi kendaraan yang melewati kabupaten yang bersangkutan	Tidak diketahui
11.	Jawa Timur	Beberapa Desa yang berdekatan	Kebebasan melintasi desa menggunakan ojek yang tidak berpangkalan di desa tersebut dibatasi, sehingga sistem transportasi menjadi ruwet, antagonistic dan mahal	Tidak diketahui
12.	Kabupaten Badung	PDAM Kabupaten Badung Warga Badung Utara	Masyarakat Badung Utara memutuskan pipa PDAM, karena pasokan air ke sawah terganggu serta perasaan tereksplorasi oleh orang kota	PDAM berpikir untuk kerjasama dengan kabupaten lain untuk memperoleh sumber air baku
13.	Kabupaten Kutai Barat	Warga Perusahaan HPH	Klaim masyarakat yang merasa dirugikan oleh HPH dan klaim kepemilikan lahan mulai dari antarkampung, antarkecamatan, antarprovinsi, hingga lintasnegara dengan Malaysia.	Tidak diketahui
14.	Kabupaten Paser	Warga masyarakat PT Perkebunan Nasional	Warga menuntut agar kebun inti dirubah menjadi perkebunan plasma sebagai resiko pemanfaatan tanah adat oleh PT. Perkebunan Nasional	Tidak diketahui

Sumber: Suwondo, 2002, McCarthy, 2002 dan Thorburn, 2002 ditambah beberapa pemberitaan Harian Kompas berbagai edisi.

persepsi tentang distribusi keuntungan) maupun yang tingkatnya perilaku (terdapat sebagian personal *stakeholders* yang mungkin rakus dan mengabaikan kepentingan *stakeholders* lain). Kemunculan konflik-konflik tersebut sebagian sudah sampai pada tindakan perusakan, menghalangi akses *stakeholders* yang lain dengan ancaman fisik maupun non-fisik, maupun yang sifatnya masih konflik wacana (*discourses*).

4. Memahami Akar Persoalan dan Resolusi Konflik

Pengelolaan sumberdaya merupakan serangkaian proses pembuatan keputusan yang sistematis untuk mengalokasikan sumberdaya dalam ruang dan waktu tertentu menurut kebutuhan, aspirasi dan keinginan dalam suatu kerangka kemampuan teknologi, institusi sosial politik,

administrasi dan hukum. Pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya seringkali menjadi tidak mudah, karena di dalamnya terdapat berbagai pihak yang semuanya ingin dipenuhi kebutuhannya dengan sumberdaya yang terbatas. Sementara itu kebutuhan sumberdaya setiap stakeholder dalam pembangunan seringkali sangat berbeda dan bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya dilakukan dengan mempertimbangan aspek-aspek pengetahuan dan teknologi, aspek politik, sosial dan ekonomi.

Pembuatan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya selain memperhatikan aspek-aspek di atas juga perlu memperhatikan sifat-sifat dasar dari sumberdaya itu sendiri sebagai suatu komponen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan dalam arti luas. Beberapa sifat dasar sumberdaya perlu dipahami secara utuh, karena perubahan pengelolaan sumberdaya dari model sentralistik ke model otonomi dapat membawa kerusakan yang tidak terpuhkan pada sumberdaya itu sendiri. Beberapa contoh mengenai hubungan antara desentralisasi dan pengelolaan sumberdaya alam dari Benua Asia (World Bank, 2000, Ross, 2001; Suwondo, 2002), Afrika (Benjaminsen, 1997, Mabogunje, 1980), Amerika Latin (Larson, 2002), Australia (Lane, 2003) secara bersama-sama menegaskan bahwa desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam merupakan satu hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi. Secara teoretik desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam oleh unit-unit

administrasi yang lebih rendah akan memberikan peluang untuk (a). diperolehnya partisipasi *stakeholders* dalam perumusan maupun implementasi kebijakan, (b). desentralisasi kewenangan dan kekuasaan memberikan peluang terwujudnya peranan masyarakat sipil dan (c). memberikan peluang terjadinya proses interaksi yang intensif antar *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pada periode transisi dari sentralisasi ke desentralisasi dalam pengelolaan sumberdaya alam memang di berbagai pengalaman negara lain juga terjadi anomie atau kebimbangan yang pada intinya terjadi karena nilai-nilai baru belum diterima secara mapan sementara nilai-nilai lama sudah harus ditinggalkan.

Pengalaman dari Nicaragua (Larson, 2002) dalam proses desentralisasi pengelolaan hutan mungkin yang paling mirip dengan yang sekarang terjadi di Indonesia. Terdapat empat isu penting yang menjadi penghambat proses desentralisasi pengelolaan hutan di Nicaragua, yaitu (a) merajalelanya korupsi, (b) terbatasnya kapasitas institusi lokal, (c) terbatasnya insentif bagi aparat, serta (d) terbatasnya komitmen jangka panjang semua *stakeholders*. Pengalaman-pengalaman lain seperti di Mali (Benjaminsen, 1997) juga menunjukkan kemiripan dengan pengalaman Nicaragua.

Selain karena persoalan-persoalan di atas sebagian, masalah dalam pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya juga terletak pada kurangnya pengetahuan substansi tentang sifat-sifat sumberdaya alam itu sendiri (Ashby, 1998). Adapun sifat-sifat dasar sumberdaya alam yang perlu

memperoleh perhatian khusus dari semua *stakeholders*, yaitu :

1). **Memiliki *stakeholders* yang banyak dengan kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda dan bahkan bertentangan satu dengan yang lain.**

Dengan demikian dalam pengelolaan sumberdaya konflik kepentingan antar *stakeholder* merupakan hal yang wajar terjadi dan dengan demikian dalam pengelolaan sumberdaya termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aspirasi berbagai *stakeholder* yang mungkin saling bertentangan. Keragaman *stakeholder* yang seperti ini sebenarnya juga melahirkan keragaman perspektif jangka waktu juga sekaligus mencerminkan keragaman persepsi terhadap pengelolaan sumberdaya itu sendiri.

2). **Memiliki aspek saling ketergantungan secara spasial, temporal dan biofisikal (*spatial, temporal and biophysical interrelationship*).**

Sumberdaya, khususnya sumberdaya alam memiliki aspek ketergantungan biofisikal antar wilayah dalam kerangka waktu tertentu. Perlakuan terhadap sumberdaya alam tertentu di satu bagian permukaan bumi selalu ada konsekuensinya terhadap sumberdaya yang sama atau berbeda baik di tempat itu maupun di tempat lain dalam waktu yang sama maupun berbeda. Kompleksitas hubungan aspek spasial, temporal dan biofisikal sumberdaya yang seperti ini seringkali tidak dipahami secara utuh oleh para pembuat keputusan itu sendiri, apalagi masyarakat awam. Hubungan erat antar aspek spasial, temporal dan biofisikal sumberdaya itu sendiri

menyiratkan perlunya kehati-hatian yang ekstra bagi pembuat keputusan untuk meminimalisir konflik kepentingan yang akan terjadi sebelum pembuatan keputusan dilakukan. Kajian mendalam tentang konsekuensi sistemik dari setiap keputusan pengelolaan sumberdaya alam tertentu perlu memperoleh penekanan.

3). **Dampak praktek pengelolaan sumberdaya yang sifatnya di tempat (*in situ*) maupun di tempat lain biasanya sulit diamati dalam jangka pendek.**

Jangkauan observasi yang dapat dilakukan para *stakeholders* pemanfaatan sumberdaya secara tradisional sangat terbatas, sejauh panca indera dan intuisi dapat menjangkaunya. Dengan demikian pemahaman masyarakat terhadap sistem sumberdaya secara utuh dalam konteks jalinan sistemik akan sulit diharapkan, sehingga dalam situasi yang seperti ini ide-ide tentang keutuhan sumberdaya sebagai suatu sistem akan sulit dipahami oleh para *stakeholders* tertentu yang berorientasi waktu ke depan yang sangat pendek. Tindakan-tindakan pemanfaatan sumberdaya di satu tempat dan risikonya di tempat yang sama di kemudian hari maupun di tempat yang secara sistemik berkaitan dengan tempat itu merupakan hal yang sulit dipahami oleh sebagian anggota masyarakat sebagai salah satu *stakeholders*. Perbedaan yang penting di sini adalah dalam hal skala ruang dan waktu observasi oleh berbagai *stakeholders* pemanfaatan sumberdaya, sehingga dalam memahami berbagai dinamika pengelolaan sumberdaya secara esensial sulit dipertemukan perbedaan pandangan antar *stakeholders*.

Hal ini juga yang membuat berbagai keputusan yang berdimensi waktu jangka panjang seringkali tidak dapat dengan mudah diterima *stakeholders* tertentu yang kadang berpandangan jangka pendek karena desakan sosial ekonominya.

4). Ketahanan sumberdaya akan terbentuk, jika umpan balik positif dapat ditanggapi dengan baik.

Sumberdaya alam sebagai suatu sistem memiliki ketahanan yang berbeda-beda sebagai bentuk responnya terhadap eksploitasi. Umpan balik positif dalam sistem sumberdaya alam sebagai bagian dari sistem lingkungan akan dapat meningkatkan ketahanan sumberdaya alam yang bersangkutan. Untuk meningkatkan ketahanannya, suatu sistem pengelolaan sumberdaya harus dapat merespon secara positif setiap umpan balik yang terjadi. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya alam perlu dilengkapi perangkat sistem informasi yang dapat menjamin respon yang tepat waktu terhadap masalah-masalah yang kritis. Satu hal yang perlu memperoleh penekanan di sini adalah kemauan politik untuk mengadopsi sistem informasi sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan yang lebih rasional dan tepat waktu. Optimalisasi sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sumberdaya perlu mencakup adanya jaminan bahwa keputusan-keputusan dalam pengelolaan sumberdaya harus dilandasi hasil monitoring dan evaluasi.

5). Ketahanan sumberdaya akan terbentuk jika kekayaan ragam

sumberdaya dapat dipertahankan.

Diversitas sumberdaya juga akan sangat menentukan ketahannya terhadap berbagai ancaman kerusakan dan degradasi. Jika diversitas sumberdaya dapat dipertahankan maka kepentingan berbagai *stakeholders* dengan beragam preferensinya relatif akan dapat dipenuhi dan dipertahankan, baik untuk kepentingan-kepentingan jangka panjang, menengah maupun pendek. Salah satu kemungkinan munculnya konflik adalah adanya upaya memaksakan spesialisasi pada satu jenis sumberdaya alam yang merupakan preferensi dari salah satu stakeholder saja, sehingga kepentingan *stakeholders* yang lain terabaikan. Dengan keragaman sumberdaya yang tinggi pilihan yang sesuai kepentingan setiap *stakeholders* akan lebih dapat dijamin, sehingga konflik dapat diminimalisir.

Kelima sifat dasar tersebut hendaknya menjadi acuan yang penting bagi para peneliti sebagai kerangka teori dalam memahami dinamika pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sangat menantang dalam era otonomi. Para peneliti yang memposisikan dirinya sebagai salah satu *stakeholders* penting dalam upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam perlu membekali dirinya tidak hanya dengan pengetahuan dan skill tentang alat (*tools*) untuk inventarisasi, analisis maupun presentasi data sumberdaya alam itu sendiri. Lebih dari semua itu saat ini diperlukan usaha-usaha sistematis memahami substansi tentang sumberdaya alam beserta substansi tentang pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah substansi tentang resolusi konflik

sumberdaya alam yang pada dasarnya mengelola berbagai kepentingan berbagai *stakeholders* yang terdiri atas manusia dan lembaga-lembaga ciptaan manusia juga.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya lebih baik dihindari konflik daripada harus menyelesaikannya jika konflik tersebut terjadi. Untuk itu yang perlu dilakukan untuk menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya adalah membawa semua *stakeholders* pada pemahaman yang sama tentang sistem sumberdaya itu sendiri. Beberapa perangkat yang tersedia untuk menghindari konflik semacam itu antara lain partisipasi publik dalam pembuatan keputusan untuk mengurangi peluang tuntutan di pengadilan oleh mereka yang tidak puas, perencanaan dan monitoring yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan antarpenggunaan sumberdaya oleh berbagai *stakeholders* dan kerjasama, koordinasi serta komunikasi untuk melibatkan *stakeholders* dalam suatu mekanisme saling memahami satu dengan yang lain. Ketiga perangkat ini dapat dikatakan sebagai prosedur normatif yang tidak akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Menghindari konflik merupakan langkah yang sifatnya preventif, tetapi seringkali konflik terjadi tanpa diduga dan justru baru disadari ketika sudah menjadi masalahnya menjadi besar dan kompleks. Untuk situasi seperti ini yang dibutuhkan adalah resolusi konflik, yang pada dasarnya adalah mengelola kepentingan *stakeholders* yang berbeda-beda sambil tetap mempertahankan integritas dan sustainabilitas pemanfaatan sumberdaya. Secara teoretik terdapat tiga pendekatan untuk melakukan resolusi konflik, yaitu

pendekatan politik, administrasi dan judicial. **Pertama**, pendekatan politik dalam resolusi konflik biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga politik yang dibuat melalui proses pemilihan yang melibatkan masyarakat melalui lobi dan penggunaan pengaruh orang atau tokoh tertentu. **Kedua**, pendekatan administratif merupakan proses resolusi konflik melalui suatu proses dan mengikuti aturan birokrasi tertentu yang hanya sesuai untuk solusi konflik-konflik yang sifatnya rutin dalam jajaran administrasi. **Ketiga**, pendekatan judicial yang dilakukan melalui jalur hukum di pengadilan yang akan menghasilkan pihak pemenang dan pihak yang kalah serta biasanya akan memakan waktu yang panjang.

Ketiga macam pendekatan dalam resolusi konflik seperti di atas dengan kelebihan dan kekurangannya seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk resolusi konflik sumberdaya yang sifatnya meluas dan kompleks dengan banyak *stakeholders*. Oleh karena itu ada juga pendekatan alternatif yang sekarang banyak dianut untuk penyelesaian konflik di berbagai bagian dunia. Pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik sumberdaya tersebut adalah yang disebut negosiasi, mediasi dan arbitrase. Perbandingan lengkap ketiga macam alternatif resolusi konflik ini diberikan pada Tabel 2 berikut.

Pendekatan resolusi konflik alternatif seperti ini semakin banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Keunggulan pendekatan ini dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan politik, administrasi maupun judicial adalah sifat-sifatnya yang persuasif bukan koersif, fleksibel tidak rigid,

lebih efektif, dapat mencapai komitmen yang lebih baik untuk penyelesaian jangka panjang dan sangat potensial memfasilitasi terbentuknya saling kesepahaman antarpihak yang bertikai. Meskipun pendekatan-pendekatan alternatif semacam ini dapat memberikan penyelesaian yang terbaik, tetapi prosesnya sendiri seringkali tidak mudah. Metode resolusi konflik alternatif ini

oleh Santosa dan Hutapea (1992) dinamakan dengan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS). Mekanisme penyelesaian masalah ini dilakukan dengan negosiasi, mediasi dan arbitrase untuk melihat penyelesaian kasus lingkungan. Kedua penulis mengangkat studi kasus yang telah diselesaikan dengan mekanisme MAPS.

Tabel 2.
Perbandingan Antara Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase dan Resolusi Konflik

Negosiasi	Mediasi	Arbitrase
Pembicaraan langsung antar dua atau lebih pihak yang berkonflik	Ada bantuan pihak lain (bukan pembuat keputusan) untuk membantu penyelesaian konflik	Ada bantuan pihak lain yang akan membuat keputusan
<ul style="list-style-type: none"> • Konsensus dikehendaki • Konflik diselesaikan sendiri oleh pihak yang bertikai 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsensus dikehendaki • Fokus pada isu konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsensus tidak selalu dikehendaki • Pihak yang bertikai menyajikan argumen
Proses yang sukarela dan terbuka	Proses yang sukarela dan menuju konsensus	Hasilnya dapat mengikat atau tidak mengikat

Sumber: Ashby, 1998

Mekanisme semacam ini dalam ilmu ekonomi mirip dengan prinsip *Pareto optimal* dalam penyelesaian masalah. Istilah ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Vilfredo Pareto yang banyak digunakan oleh para ahli lain dalam penyelesaian masalah. Pengertian Pareto optimal menurut *Mac Millan Dictionary of Modern Economics* adalah: *A reallocation of resources which make at least one person better off while making no one worse off* (Pearce, 1979).

Prinsip ini mengandung upaya penyelesaian yang sama-sama menguntungkan atau setidaknya tidak ada yang dirugikan. Bila ada satu pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lain

dirugikan, maka prinsip ini diberlakukan pada yang beruntung untuk menutup atau memberikan kompensasi bagi yang tidak beruntung. Prinsip tersebut terkait dengan proses penyelesaian yang dilakukan secara partisipatif, inklusif, transparan dan yang lebih penting adalah menyentuh rasa keadilan semua pihak, yang tidak hanya bicara untung dan rugi.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase di Indonesia tampaknya cenderung banyak dilakukan oleh pihak-pihak pencemar (industriawan) dan masyarakat sekitar (penduduk, petani, petambak, dan buruh). Berkaitan dengan

upaya tersebut terlibat pula pemerintah (pusat dan daerah), LSM, media masa dan kalangan perguruan tinggi. Mereka berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk mempercepat penyelesaian masalah. Di pihak lain ada yang mengkritik metode memiliki sejumlah kelemahan terutama berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau semua masalah diselesaikan secara musyawarah, bagaimana dengan penegakan hukumnya? Menurut pendapat kelompok ini, sudah semestinya berbagai persoalan yang terjadi diselesaikan secara hukum melalui proses pengadilan.

Di luar kedua kelompok tersebut, ada sekelompok yang mementingkan kepentingan dan keuntungan sendiri. Kelompok semacam ini sering disebut oknum yang menghambat penyelesaian dengan mengambil keuntungan sendiri (*vested interest*) atau melakukan agitasi untuk memperkeruh konflik sehingga konflik menjadi lebih besar dan luas dalam rangka memperoleh keuntungannya sendiri tadi. Pola pemasalahan dan konflik lingkungan berbagai studi kasus yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat dicermati bahwa perubahan lingkungan terkait dengan perkembangan pembangunan yang begitu cepat. Perubahan sosial ekonomi yang berlangsung secara cepat dan dramatis, dapat pula merubah kondisi dan kemampuan lingkungan. Kecenderungan perubahan global terkait dengan perkembangan jumlah kependudukan yang semakin besar dalam 50 tahun terakhir, teknologi yang berkembang

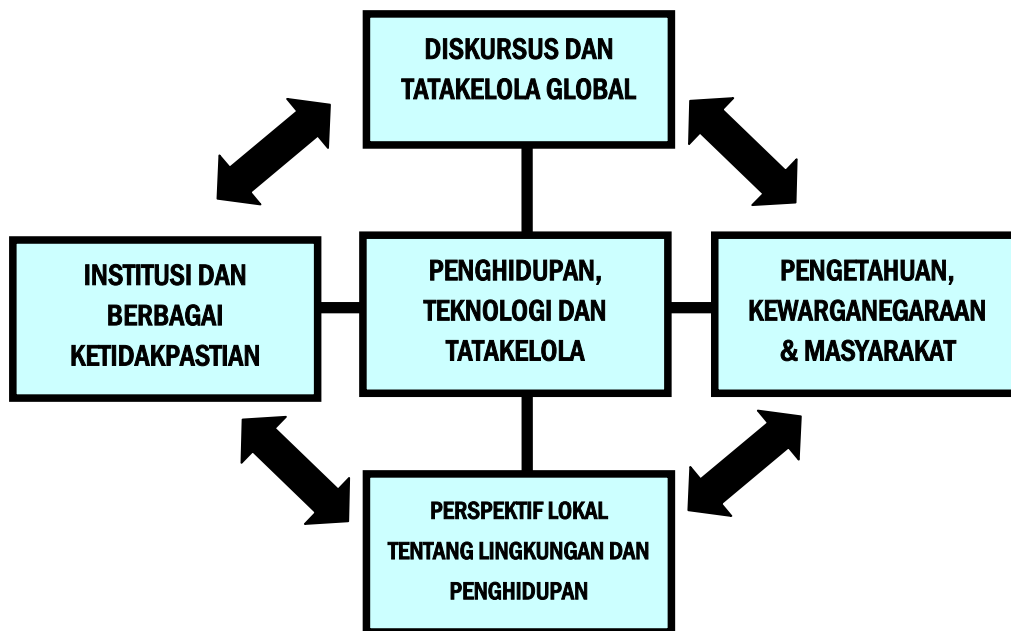
pesat, tata organisasi (ekonomi, sosial dan politik) yang bergerak lintas batas dan jaringan informasi yang semakin mudah diakses.

Perubahan global jelas akan berpengaruh pada tingkat lokal, demikian pula sebaliknya. Dari interaksi global-lokal nampak terjadi perubahan yang menunjukkan bahwa semakin menganga jurang antara negara kaya dan miskin, maupun secara mikro dapat disaksikan ketidakadilan dan kesenjangan di masyarakat. Selain itu hubungan hirarkhis dan asimetris antara negara-negara sedang berkembang dan negara-negara maju yang masih akan tetap menyiratkan adanya ketergantungan atau bahkan konflik yang satu dengan lainnya. Hal ini perlu memperoleh perhatian yang lebih besar. Sifat-sifat hubungan yang asimetris semacam ini membawa konsekuensi yang buruk pada eksploitasi sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan di negara sedang berkembang dan layak menjadi salah satu agenda penelitian untuk pengelolaan sumberdaya yang lebih adil dan berlanjut. Dengan demikian persoalan sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu dilihat dan diletakkan dalam konteks hubungan global antar kekuatan negara sedang berkembang dan negara maju atau hubungan utara selatan. Selain itu konsekuensi hubungan asimetris utara-selatan seperti disebutkan di atas juga sangat menarik dikaji pada tingkat mikro dan rumahtangga, khususnya dalam hal strategi penghidupan (*livelihood*

strategy) masyarakat yang lokal basis sumberdaya alamnya bersinggungan langsung dengan eksploitasi oleh kekuatan-kekuatan global. Gambar berikut memberikan ilustrasi bahwa penelitian tentang pengelolaan sumberdaya alam perlu mewedahi dinamika pada tingkat global yang memiliki konsekuensi perubahan pada perspektif lokal tentang lingkungan dan strategi penghidupan.

Secara substansi penelitian dalam tema pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam meliputi bidang yang sangat luas dan kompleks. Karena itu penelitian-penelitian semacam ini tidak mungkin dilakukan secara monodisiplin, tetapi justru memberi peluang bagi penelitian-penelitian interdisipliner dengan melibatkan berbagai spesialisasi seperti

ekologi, sejarah lingkungan, hubungan internasional, antropologi, ekonomi kelembagaan, geografi, ilmu politik dan sosiologi. Sementara itu metode yang digunakan juga harus lebih fleksible dengan mengkombinasikan teknik-teknik penelitian partisipatoris, etnografis dan studi kasus untuk melengkapi teknik survei konvensional termasuk penggunaan teknik inderaja dan sistem informasi geografis. Integrasi antara teknik pemetaan menggunakan teknik inderaja dan metode partisipatoris sudah dimulai dalam satu-dua tahun terakhir ini. Ini sangat diperlukan karena cakupan wilayah studi dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi *multi level* yang melibatkan stakeholders lokal tetapi juga pelaku-pelaku global.



Gambar 1. Kontinuum antara Diskursus Global dan Dinamika Lokal dalam Penelitian Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam

Sumber: <http://www.ids.ac.uk/ids/env/enreag.html> (tanggal 9 Agustus 2003)

5. Simpulan

Teori-teori tentang konflik berlatar sumberdaya dan lingkungan hidup memberikan gambaran tentang dominasi kekuatan-kekuatan utama dunia dalam eksploitasi sumberdaya dan lingkungan secara global. Dalam konstelasi ini negara-negara maju memiliki posisi dominan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan negara-negara sedang berkembang cenderung berada pada posisi marginal. Selain relevan menjelaskan berbagai konflik pada lingkup global, beragam teori tentang konflik sumberdaya dan lingkungan yang telah dibahas dalam artikel ini ternyata memiliki relevansinya masing-masing dalam menjelaskan terjadinya berbagai konflik lingkungan dan sumberdaya pada tingkatan yang lebih kecil.

Konflik-konflik berkait sumberdaya dan lingkungan di Indonesia yang justru

menguat setelah otonomi ternyata dapat dijelaskan melalui keempat teori yang telah dibahas sebelumnya. Setiap kali terjadi konflik sumberdaya dan atau lingkungan dapat dengan relatif mudah dijelaskan melalui teori ketamakan, syndrome NIMBY, teori mengail di air keruh dan teori kelangkaan. Sebuah konflik lingkungan dan sumberdaya seringkali sulit dijelaskan dengan penjelasan yang tunggal, tetapi dapat dijelaskan lebih memuaskan menggunakan berbagai teori di atas. Kompleksitas masalah dalam suatu konflik lingkungan dan sumberdaya alam merupakan tantangan tersendiri yang dapat dijadikan agenda riset multidisipliner. Berbagai cabang ilmu seperti geografi, hukum, sosiologi, pertanian dalam arti luas, ekonomi, administrasi publik, sosiologi maupun teknologi dapat memainkan kontribusi unik masing masing dalam penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

- Allen, J. C. 2001. Community Conflict Resolution: the Development of Sosial Capital Within an Interactional Field. *The Journal of Socio-Economics*. Elsevier Science.
- Ashby, Jacqueline. 1998. Alternative Approaches to Managing Conflict in the Use of Natural Resources. Presentation Material. *International Workshop on Natural Resource Management*. Washington DC. May 1998.
- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. ideAs dan TransMedia Global Wacana. Yogya.
- Baiquni, M. 2003. *Membangun Pusat-Pusat di Pingiran: Otonomi Dalam Perspektif Geografi*. Yogyakarta: ideAs.
- Barber, Charles Victor. 2002. Forest, Fires and Confrontation in Indonesia. Dalam Mathew, Richard, Mark Halle and Jason Switzer (Editors). 2002. *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*. Winipeg, Manitoba. International Institute for Sustainable Development.
- Billon, P.L. 2001. The Political Ecology of War: Natural Resurce and Armed Conflicts. *Political Geography* no. 20, pp. 561-584. Elsevier Science Inc.
- Collier, Paul and Anke Hoeffler. 2000. *Greed and Grievance in Civil War*. Policy Research Working Paper 2355. World bank Development Research Group. World Bank, Washington.
- Cornwall, R. 2002. Where to go from Here? (Conclusion). In Lind, J. et al. 2002. *Scarcity and Surveit: The Ecology of Africa's Conflicts*. ACTS. Kenya.
- de Soysa, Indra. 2000. Natural Resources and Civil War: Shrinking Pie or Honey Pot?. *Paper presentad at the International Studies Association*. March. Los Angeles.

- Fink, C.F. 1968. Some Conceptual Difficulties in the Theory of Sosial Conflict. *The Journal of Conflict Resolution*, Special Review Issue (December, 1968) 412-460.
- Froukh, L.J. 2003. Transboundary Groundwater Resources of the West Bank. *Water Resurce Management* 17: 175-182. Kluwer Academic Publishers.
- Glasbergen, Peter (ed.) 1995. *Managing Environmental Disputes: Network Management as an Alternative*. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands.
- International Crisis Group. 2001. *Indonesia: Natural Resources and Law Enforcement*. ICG. Jakarta/Brussels
- Jones, S. 1998. Conflict About Natural Resources. *Quarterly Paper Foodstep* no 36, September 1998. Tearfund. England.
- Lane, Marcus B. 2003. Decentralization or Privatization of Environmental Governance? Forest Conflict and Bioregional Assessment in Australia. *Journal of Rural Studies*. No, 19 (2003). pp: 283-294.
- Mabogunje, Akin. L. 1980. The Dynamics of Ceter-Periphery Relations: The Need for a New Geography of Resource Development. *Transactions of the Institute of British Geograpers*, New Series, Vol. 5, Issue 3, pp. 277-296. The Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers.
- Mathew, Richard, Mark Halle and Jason Switzer (Editors). 2002. *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*. Winipeg, Manitoba. International Institute for Sustainable Development.
- McCarthy. John F. 2002. Turning in Circles: District Governance, Illegal Logging, and Environmental Decline in Sumatera Indonesia. *Society and Natural Resources*. No. 15. pp: 867-886.
- Ohlsson, L. 2000. Water Conflicts and Sosial Resource Scarcity. *Physical Chemistry Earth*, Vol 25, no. 3. pp. 213-220. Elsevier Science Ltd.
- Pierce, John C. 1979. Conflict and Consensus in Water Politics. *The Western Political Quarterly*. Vol. 32. pp: 307-319.
- Porto, J.G. 2002. Contemporary Conflict Analysis in Perspective (Chapter One). In Lind, J. et al. 2002. *Scarcity and Surveit: The Ecology of Africa's Conflicts*. ACTS. Kenya.
- Ribot, J.C. 1999. Accountable Representation and Power in Participaty and Decentralized Environmental Management. *Unasylva* 199. Vol 50.
- Rijanta, R. 2002. Migrasi dan Pembangunan Regional di Indonesia. Paper disampaikan dalam *Seminar Nasional Mobilitas Penduduk dalam Era Otonomi Daerah Menyambut Purna Tugas Prof. Dr. Ida Bagus Mantra*, Guru Besar Mobilitas Penduduk pada Fakultas Geografi UGM. 9 Februari 2002.
- Rijanta, R. 2006. Tempat Dan Ruang Dalam Studi Pemekaran Wilayah: Perspektif Teori dan Kajian Pengalaman Empirik Kabupaten Kutai. *Majalah Geografi Indonesia*. Vol. 20, No.2. September 2006.
- Santosa, Mas Ahmad dan Hutapea, A.L.P. 1992. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Walhi. Jakarta.
- Schäfer, K. 2000. Globalized Conflicts of Discourse: The Type of Conflict of Proxies *GeoJournal*, No. 52: 45-58. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
- Slater, David. 2000. The Process and Prospect of Political Geography. *Political Geography*. Vol. 19. pp: 1-3.
- Suwondo, Kutut. 2002. *Decentralization in Indonesia*. INFID's Background Paper on Decentralization. Jakarta, INFID.
- The World Bank. 2000. Indonesia's Decentralization Ater Crisis *PREMnotes Poverty Reduction and Economic Management* No. 43.
- Thornburn, Craig. 2002. Regime Change Prospect for Community-Based Resource Mangement in Post-New Order Indonesia. *Society and Natural Resources*. No. 15. pp: 617-628.
- Welford, R. 1996. Regional Development and Envrnmental Management: New Opportunities for Cooperation. *Scandinavian Journal of Management*, Vol. 12, No. 3, pp. 347-357. Elsevier Science Ltd.

Biodata Singkat para Penulis:

Dr. M. Baiquni, M.A. adalah Lektor Kepala pada Jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi dan Pascasarjana UGM. Fellow LEAD London (*Leadership for Environment and Development*), pernah mengikuti *training skill for Negotiation and Decision Making* in Sao Paolo, Brazil dan training bertema *Integration and Disintegration: Society in Transition* di Moscow, Russia dan di Chincinau, Moldova. Memperoleh M.A. in *Development Studies* dari *Institute of Sosial Studies*, Den Haag tahun 1993 dan telah menyelesaikan doktornya dalam program sandwich UGM/Utrecht University, The Netherlands tahun 2006.

(e-mail: baiquni@lead.or.id).

Dr. R. Rijanta, M.Sc. adalah Lektor Kepala pada Jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi dan Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) dan Sekretaris PSPPR – Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPPR), UGM. Mendapat gelar Master of Science (M.Sc.) dalam bidang Survey Integration for Resource Development di ITC Belanda tahun 1990, sebagai Research Fellow di UNCRD Nagoya, Jepang 1992 dan *Training on Rural and Regional Development Planning*, Utrecht University 1999-2003 dan menyelesaikan doktornya dalam program sandwich UGM/Utrecht University, The Netherlands pada tahun 2006.

(e-mail: masrijanta@yahoo.com).

Kepada
Yth. Bapak Nyoman Wardi
di Denpasar

Dengan hormat,

Berikut saya kirimkan sebuah tulisan tentang konflik lingkungan dan sumberdaya alam untuk dapat dipertimbangkan dimuat dalam BUMI LESTARI. Paper ini saya tulis berkolaborasi dengan teman sekantor saya Pak Baiquni. Karena beliau yang yang memang pakar lingkungan, beliau saya tampilkan sebagai penulis pertama.

Kalau Pak Wardi memerlukan beliau sebagai pengganti almarhum Prof. Koesnadi sebagai reviewer BUMI LESTARI, silahkan kontak lewat e-mailnya langsung yang ada di dalam teks atau bisa saya hubungkan. Saya akan ajak beliau bersama membantu BUMI LESTARI.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik saya sampaikan terima kasih.

Salam,

Pak Rijanta